

DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN : STUDI PADA NEGARA KOREA SELATAN DAN NEGARA INDIA

¹ Dina Fadiyah, ² Muhamad Fathan Mandela

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Selamat Sri

Email: dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id

Received: 04 September 2025; Revised: 20 Oktober 2025; Accepted: 01 November 2025;
Published: Desember 2025; Available online: Desember 2025

Abstract

This research aims to explore the role of democracy as a primary instrument in achieving prosperity and the formation of a welfare state, by comparing the experiences of two Asian nations: South Korea and India. Utilizing a qualitative-descriptive approach and library research methodology, this article analyzes how democratic mechanisms influence the distribution of social security and the effectiveness of public policy. The findings indicate that South Korea's democratic transition following the 1980s transformed a previously limited social security system into an inclusive and collaborative model, with national insurance coverage reaching 98.6% of the population by 2018. Conversely, although India stands as the world's largest democracy, it faces significant hurdles in implementing welfare programs—such as the MGNREGA—due to prevailing practices of populism and clientelism that obstruct citizen accessibility. The comparison of these two countries underscores a positive correlation between a high democracy index and the successful development of a welfare state. In conclusion, a healthy and collaborative democracy is not merely a political procedure but a fundamental prerequisite for fostering equitable economic prosperity for all citizens.

Keywords: India, South Korea, Welfare State, Democracy, Social Security.

Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem yang mempunyai sejarah panjang menawarkan harapan dari lahirnya pemerintahan yang peduli terhadap rakyatnya, berasal dari jaman Yunani kuno hampir 500 tahun sebelum masehi. Demokrasi bagaikan harapan setelah hak rakyat tidak diberikan pada saat itu, dengan kehadiran demokrasi kesetaraan dapat dihadirkan dalam ruang publik (Ober. 2008). Sejalan dengan itu Beethem (1999) memberikan pandangan bahwa kehadiran demokrasi bermuara pada apa yang disebut dengan kesetaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Kesetaraan dalam pandangan demokrasi berarti berujung pada kesejahteraan rakyatnya, perdebatan yang ada antara demokrasi dan kesejateraan sampai saat ini masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan oleh para akademisi, meninggalkan sebuah pertanyaan apakah demokrasi menghasilkan kesejahteraan ataukah kesejahteraan yang menghasilkan demokrasi. Yang jelas Kevin Olson dalam (Purwanto & Syawie. 2012) menegaskan pemikir politik kontemporer mengalami krisis ketika aspek kesejahteraan absen dalam pembicaraan demokrasi, seharusnya pembicaraan demokrasi tidak

terlepas dari aspek kesejateraan dan mampu mensinergitaskan keduanya. Argumentasi yang jelas dari Kevin Olson tersebut seolah melegitimasi bahwa demokrasi dan kesejahteraan adalah paket lengkap yang tidak bisa di pisah satu sama lain.

Dibelahan dunia ini terdapat negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan mereka guna mencapai kesejateraan untuk rakyatnya, sebut saja Korea Selatan dan India. Dimulai dengan Korea Selatan, negara dengan julukan negeri Ginseng ini menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial campuran dimana Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat Korea Selatan dalam pemilihan umum yang digelar lima tahun sekali, sementara Perdana Menteri dan kabinet dipilih langsung oleh Presiden (Rachman. 2022)

Gerbang menuju demokrasi di Korea Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1980, menurut Oktaviani dan Mulyana (2018) ketika gerakan massa bernama demokratik Gwangju yang diisi oleh mahasiswa dan lapisan masyarakat Korea Selatan lainnya berusaha menghalangi terjadinya kudeta oleh kelompok militer yang baru. Gerakan

tersebut merupakan titik balik dalam demokratisasi di Korea Selatan yang diwujudkan dalam konfrontasi langsung antara kelompok pro demokrasi dengan militer yang berusaha melakukan kudeta saat itu. Gerakan demokratik Gwangju dilatarbelakangi oleh sistem kapitalis yang dikuasai oleh kelompok konglomerat Korea Selatan saat itu, walaupun pada saat itu ekonomi Korea Selatan sedang mengalami kejayaan akan tetapi para pekerja menjadi sarana eksploitasi dari sistem kapitalis yang ada.

Sebelum terjadinya gerakan pro demokrasi di Gwangju, Korea Selatan dipimpin oleh rezim junta militer Park Chung Hee, seperti diktator lainnya yang memerintah dengan tangan besi Park Chun Hee mampu menghadirkan stabilitas ekonomi maupun politik yang bertumpu pada militer, birokrat, maupun teknokrat dalam kendali sentralnya (Darini. 2010). Seperti sebuah karma yang membayangi Park Chun Hee, ketika dia mengambil alih kekuasaan dengan cara kudeta militer kemudian dia juga mengalami hal yang sama dengan dipaksa mundur dari jabatan Presiden oleh warganya sendiri, dan yang lebih mengenaskan dia meninggal di tangan kepala Badan Intelijen Pusat Korea Selatan tahun 1979. Walaupun mampu menghadirkan stabilitas politik maupun

ekonomi dimasa Presiden Park akan tetapi masyarakat Korea Selatan mengharapkan adanya pemerintahan yang lebih demokratis, hal itu pula yang menjadi salah satu penyebab gerakan demokratik Gwangju dimana gerakan itu harus mengorbankan ratusan nyawa manusia (Irfan, 2017). Selain itu penyebab munculnya gerakan demokratik Gwangju adalah peresmian konstitusi Yushin yang mana Presiden Park Chun Hee saat itu dimungkinkan menjadi presiden kembali setelah melewati dua periode (Korea Chobo. 2018).

Ekonomi Korea Selatan sepanjang dijalankan oleh pemerintahan yang otoriter bernuansa kapitalisme, akan tetapi kapitalisme di Korea Selatan berakhir pada saat krisis melanda Asia pada tahun 1997-1998, Iriansyah (2020) menilai sebelum terjadinya krisis Asia Korea Selatan adalah etalase kapitalisme Amerika Serikat yang dibangun dalam rangka menghadapi perang dingin dengan melawan sosialisme blok timur. Pasca krisis Asia Korea Selatan berangsur beralih dari tradisi kapitalisme menuju negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dilansir dari laman *korea.net* (2020) Korea Selatan menjalankan sistem kesejahteraan dengan norma Internasional, upah

minimum per jam untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar 8.590 Won. Skema asuransi diberikan terhadap perlindungan untuk bencana, penyakit, pengangguran dan kematian, tahun 2018 sekitar 51 juta penduduk korea selatan atau 98.8% dari penduduk Korea Selatan menikmati manfaat dari sistem asuransi kesehatan nasional. Serta skema asuransi lainnya seperti pensiun nasional, asuransi kesehatan nasional, asuransi ketenagakerjaan, dan asuransi kompensasi kecelakaan industri.

Sementara itu India sebagai negara yang menerapkan demokrasi juga mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, demokrasi di India disebut sebagai ajang pesta demokrasi terbesar didunia karena dalam pemilihan umum yang diselenggarakan diikuti oleh 900 juta manusia (CNBC Indonesia. 2019). Negara Bollywood ini menerapkan sistem Republik Federal dimana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (KBRI New Delhi. 2022)

Kehidupan demokrasi di India berasal dari atas, akan tetapi bukan dari kalangan borjuis seperti yang terjadi di Eropa, melainkan melalui koalisi antar elit politik dengan tiga kelompok utama, yaitu profesional perkotaan, komunitas

pengusaha india, dan para pemilik tanah dipedesaan. Demokrasi seperti ini mendahului partisipasi publik karena sudah terjadi negosiasi diantara elit politik tersebut, akan tetapi demokrasi seperti ini merupakan kondisi ideal dalam konteks transisi politik di negara berkembang (Flamirion & Muradi. 2016). Ketidakstabilan demokrasi di India terus berlanjut di era Perdana Menteri sekarang, demokrasi di India mengalami kemerosotan sejak pemerintahan Narendra Modi mempromosikan kampanye nasionalis-hindu, penurunan drastis itu mengacu pada indikator penyensoran media, represi organisasi masyarakat sipil, dan pelemahan otonomi lembaga pengelola pemilu (Margiansyah. 2021)

Kehidupan ekonomi India pada dekade pasca kemerdekaan tidaklah pesat bahkan menjurus kearah yang lamban, barulah dekade 1990-an ketika pemerintahan Rajiv Gandhi melalui menteri keuangan membuat program reformasi ekonomi perlahan tapi pasti ekonomi India tumbuh secara pesat. Reformasi ekonomi yang ada meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan serta kebijakan investasi asing langsung yang restriktif, sejak saat itu India muncul sebagai negara utama dalam teknologi

kesejahteraan, negara paripurna dan demokratisasi masyarakat memiliki korelasi yang saling berkesinambungan sebab adanya negara yang sejahtera ini berakhir pada negara paripurna, negara yang dapat melindungi warga negaranya secara utuh dan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga adalah Nurul Hikmah tahun 2013 menulis tentang hubungan demokrasi dengan pembangunan ekonomi, berkesimpulan bahwa memahami demokrasi dan inti dari pembangunan ekonomi maka didapatkan bahwa demokrasi seharusnya berjalan seiringan dengan pembangunan ekonomi (kesejahteraan dan kemakmuran). Secara empiris telah jelas dibuktikan bahwa ada korelasi yang erat antara sistem politik yang ditempuh dengan tingkat kemajuan ekonomi. Tentu demokrasi menawarkan harapan untuk kesejahteraan yang ada.

Selanjutnya artikel dari Gunawan (2019) meneliti tentang peran negara dan penerapan pancasila dalam mewujudkan negara kesejahteraan di Indonesia, berkesimpulan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* di Indonesia mengutamakan kesejahteraan warga negara dengan

bersumber pada pancasila yang mengedepankan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yang terakhir artikel dari Suharto (2006) disampaikan dalam seminar *Institute for Research and Empowerment (IRE)* dengan tema Peta dan Dinamika *Welfare State* Di Beberapa Negara yang membahas lebih dalam soal pelajaran yang bisa di petik oleh Indonesia. Suharto menjelaskan dalam artikelnya bahwa model *welfare state* beragam makna dan bentuknya, seperti model universal yang biasa dipakai oleh negara skandinavia, model korporasi, model residual, model minimal. *Welfare state* dalam penerapannya memang bukan hanya untuk kelompok miskin saja, oleh karena itu Suharto menilai bahwa *welfare state* tidak dapat menghapus kemiskinan. Untuk itu program sosial yang ada tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan.

Berdasarkan uraian studi literatur diatas menjelaskan bahwa demokrasi

dan kesejahteraan terdapat hubungan yang saling terikat, di beberapa negara demokrasi mampu mewujudkan kesejahteraan melalui program sosial yang negara berikan. Sejauh studi literatur yang penulis sampaikan tidak ada yang secara spesifik menjelaskan hubungan demokrasi untuk kesejahteraan di negara Korea Selatan dan India, untuk itu penulis akan menulis artikel tentang demokrasi jalan menuju kesejahteraan di negara Korea Selatan dan India karena terdapat kebaruan dari studi literatur yang disampaikan diatas.

Dalam sejarahnya kita mengenal demokrasi dengan berbagai macam gaya dan pemahaman, demokrasi dipakai oleh banyak negara karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang mampu memberikan harapan terhadap kedaulatan rakyat. Menilik sejarah lahirnya demokrasi disebabkan kekuasaan feodal yang mengakar waktu itu, rakyat tidak diberikan keleluasaan untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Melihat asal usul nama demokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani dari gabungan kata demos dan kratos, demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Sehingga memiliki arti kekuatan rakyat. Akan tetapi kata demos disini mengacu pada badan

kolektif, dan kata kratos tidak pernah dipakai untuk jabatan, tetapi pemberdayaan atau kapasitas untuk melakukan sesuatu, sehingga setiap orang kata dalam demos berada dalam lingkup setara, dan akan menikmati akses ke kekuasaan publik (Ober, 2008)

Sementara itu beberapa faktor fundamental yang disampaikan oleh Beetham (1999) seperti soal publik, kontrol publik, urusan publik dan kesetaraan. Kendali oleh warga negara atau kontrol publik atas persoalan-persoalan kolektif mereka, dan kesetaraan antara warga negara dalam melaksanakan kendali tersebut merupakan prinsip-prinsip kunci dari demokrasi. Selanjutnya adalah urusan publik dapat dipraktekan mulai dari level terendah dari kehidupan terkecil misalnya bertetangga dan lingkungan kerja yang dapat mereka laksanakan sesuai kontrol diri mereka. Dalam skala yang lebih luas, yaitu dengan memberikan keputusan kolektif bagi diri mereka sendiri melalui pemilihan umum. Kemudian tentang aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif untuk kelompok mana pun, dari keluarga atau kelompok atau teman hingga asosiasi yang lebih besar adalah bagian dari publik itu sendiri

Kedua teori tersebut menekankan pada satu hal yaitu kesetaraan, bahwasannya demokarasi harus berujung pada kesetaraan dapat dilihat dari kesejahteraan yang mampu diciptakan dari negara demokrastis. Dengan begitu menunjukkan kejelasan bahwa demokrasi mampu membawa kesejahteraan bagi siapa saja negara yang mengadopsi sistem tersebut.

Menurut Hague dan Harrop (2004) negara kesejahteraan pertama kali dikembangkan oleh Jerman melalui kanselir Jerman saat itu Otto von Bismarck tahun 1871-1990, pemerintah Jerman saat itu melakukan skema asuransi sosial seperti kecelakaan dan penyakit untuk pekerja industri mereka. Langkah cerdas pemerintah Jerman saat itu diikuti oleh banyak negara demokrasi lainnya hingga tahun 1920-an kesejahteraan bukan hanya berfokus pada kecelakan dan penyakit tetapi sudah keranah asuransi pensiun dan tunjangan keluarga. Sampai pada tahun 1960-an dan 1970-an negara kesejahteraan mencapai puncaknya di negara barat terutama eropa utara.

Sementara itu Wang (2017) melihat perkembangan negara kesejahteraan berfokus pada eksploitasi variabel politik atau ekonomi, seperti industrialisasi, memobilitas sumber daya

kelas buruh, atau peran negara. Faktor politik dan ekonomi memang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan, namun kapasitas penjelasan yang ada terbatas pada ekspansi kuantitatif negara kesejahteraan dan tidak dapat menghadapi variasi histori atau historigrafi yang rinci dari negara kesejahteraan. Oleh karena itu para peneliti kontemporer mengeksplorasi keragaman negara kesejahteraan dan membuka bidang baru perbandingan lintas-nasional tentang rezim kesejahteraan.

Dalam negara kesejahteraan terdapat program kesejahteraan yang dibuat oleh negara sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap warga negaranya, walaupun disetiap negara mungkin berbeda perihal pembiayaan program kesejahteraan. Oleh karena itu Kwon (1999) membedakan peran negara dalam pembiayaan program kesejahteraan, menurutnya ada tiga intervensi negara dalam pembiayaan program kesejahteraan. Pertama negara selaku penyedia dan pembayar untuk layanan sosial, kedua negara sebagai pengatur kebijakan layanan sosial dengan produk undang-undang, ketiga adalah negara sebagai pemelihara pasar dimana layanan sosial diserahkan

cncb.indonesia.com diamini oleh Widuri (2021) yang menjelaskan bahwa di negara yang demokratis seperti di eropa tingkat kesejahteraan rakyatnya terjamin, demokrasi mampu menghadirkan kesejahteraan sebagai hasil dari sistem yang dianut.

Korea Selatan Sebagai Negara Kesejahteraan

Seperti halnya negara skandinavia di eropa, Korea Selatan jua mempunyai tingkat demokrasi yang cukup tinggi, berdarakan *Democracy Index 2021* Korea Selatan menempati urutan ke-16 dari 167 negara dalam hal negara yang demokratis (kbs.word. 2022). Negara demokratis Korea Selatan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warganya, dilansir dalam laman *korea.net* (2020) Korea Selatan menjalankan sistem tenaga kerja dan kesejahteraan berbasis norma internasional, pemberlakuan undang-undang yang setara antara laki-laki dan perempuan menghasilkan Korea Selatan sebagai negara dengan indeks kesetaraan gender yang bagus, bahkan Korea Selatan menempati peringkat ke-10 dari 189 negara. Terdapat juga skema asuransi sosial utama yaitu pensiun nasional, asuransi kesehatan nasional, asuransi ketenagakerjaan, dan asuransi kompensasi kecelakaan industri.. Semua

orang harus dilindungi oleh asuransi kesehatan nasional, melalui skema itu akhir tahun 2018 51 juta penduduk atau 98,6% dari seluruh penduduk Korea Selatan menikmati manfaat yang diberikan di bawah sistem asuransi kesehatan nasional yang dikelola negara.

Peralihan sistem pemerintahan dari otoritarianisme menuju demokrasi di Korea Selatan berdampak pula terhadap tingkat kesejahteraan warga Korea Selatan, seperti dalam hal upah minimum, tahun sebelum terjadinya gerakan Gwangju dimana titik awal kehidupan demokrasi diharapkan belum terdapat sistem upah minimum, barulah setelah kehidupan demokrasi terjadi tahun 1988 sistem upah minimum diterapkan di Korea Selatan, dan terus meningkat hingga 9.590 won ditahun 2020 (*korea.net. 2020*).

Ciri umum dari negara yang menerapkan sistem kesejahteraan untuk warganya dapat dilihat dari berbagai macam program jaminan sosial, Korea Selatan dimulai dari rezim Park Chun Hee memulai pembuatan jaminan sosial untuk warganya seperti program pensuin nasional, kwon (1999) menilai program itu awalnya hanya untuk legitimasi politik pemerintahan Park Chun Hee yang bersifat otoriter, program yang dimulai pada tahun 1973 akan

tetapi baru terealisasi pada tahun 1988 dimana Korea Selatan sudah demokratis. Dalam program ini mekanismenya adalah tempat kerja yang memiliki lebih dari sepuluh orang harus bergabung dengan program pensiun nasional, tetapi program ini bersifat sukarela untuk seluruh populasi pekerja. Sementara untuk sektor industri karyawan yang bekerja hanya membayar setengah dari kontribusi yang diperlukan, setengahnya harus dibayar oleh pemilik usaha tersebut. Sedangkan pemilik dan industri harus membayar penuh, karena peraturan industri menyumbang lebih dari 50 persen dari mereka yang berpartisipasi dalam program ini, yang pada tahun 1990 mencakup 15,7 persen dari populasi pekerja.

Kemudian program asuransi industri, Kwon (1999) mencatat skema asuransi kecelakaan industri menjadi program kesejahteraan wajib pertama yang diperkenalkan di Korea, alasan program ini dilaksanakan karena program asuransi ini mudah didanai dan diimplementasikan di Korea Selatan. Terlebih UU Standar Ketenagakerjaan tahun 1953 yang memberikan pekerjaan sudah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa memandang penyebabnya dan siapa yang harus disalahkan. Alasan

berikutnya CSS selaku komite jaminan sosial menilai bahwa buruh yang terluka akan berada dalam situasi keuangan yang lebih sulit daripada pengguran yang berbadan sehat karena kehilangan kemampuan untuk bekerja.

Pada awal skema ini diperkenalkan hanya mencakup 500 karyawan atau lebih, kemudian jumlah orang yang ditanggung dalam asuransi ini terus meningkat, pada tahun 1987 pasca gerakan Gwangju yang menuntut demokrasi asuransi ini diperluas yang mencakup tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari lima orang. Dan pada tahun 1990 sekitar 41,3% orang yang bekerja masuk dalam skema asuransi ini, asuransi kecelakaan industri dibiayai oleh kontribusi dari pemberi kerja, dan pemerintah mensubsidi biaya administrasi untuk mendirikan program tersebut di dua tahun pertama. Untuk mendapatkan kompensasi dalam asuransi ini kecelakaan harus terjadi dalam proses kerja dan penyebab kecelakaan harus terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan, asuransi ini cakupannya lebih luas dari sekedar asuransi, dimana 1975 hanya mampu membeli rumah sakit Changsong dan tahun 1990 dimana sistem demokrasi sudah berjalan di Korea Selatan dana asuransi menjalankan

tujuh rumah sakit, satu rehabilitas dan tiga pusat pelatihan.

Selain itu Korea Selatan juga mempunyai program jaminan sosial berupa bantuan publik, Kwon (1999) mencatat bahwa program bantuan publik diberlakukan pertama kali pada tahun 1965 dimasa pemerintahan otoritarianisme Park Chun Hee. Dimasa rezim tersebut cakupan program ini terbatas barulah setelah pemerintahan yang demokratis pada tahun 1990 Program Bantuan Publik mencakup 7,7% dari populasi masyarakat Korea Selatan.

Selanjutnya adalah program asuransi kesehatan nasional, Kwon (1999) menyebut program ini berawal dari pemerintahan otoritarianisme Park Chun Hee, yang pada saat itu hanya segelintir orang yang mendapatkan program ini, kemudian tahun 1977 asuransi kesehatan nasional menjadi program wajib, pada tahun 1978 hanya 10,49% masyarakat Korea Selatan yang mendapatkan akses asuransi ini. Terbatasnya akses warga Korea Selatan selama pemerintahan yang otoriter tidak terjadi setelah demokratisasi terjadi di Korea Selatan, kemudian pasca gerakan demokratisasi Gwangju tahun 1987 meningkat menjadi 51,13% dan terus meningkat ke angka 92.3% pada tahun 1990. Bahkan ketika indeks demokrasi

Korea Selatan terus membaik pada tahun 2018 51 juta penduduk atau 98,6% dari seluruh penduduk Korea Selatan menikmati manfaat yang diberikan di bawah sistem asuransi kesehatan nasional yang dikelola negara.

Semua program kesejahteraan sosial yang ada adalah bagian dari pengembangan dimasa pemerintah yang demokratis yang kolaboratif, ketika krisis Asia terjadi tahun 1997 dan 1998 pemerintahan Kim Dae-Jung segera membentuk Komisi Tripartit yang mengkonsolidasikan perwakilan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari Konfederasi Korea, Serikat Pekerja (KCTU) dan Federasi Serikat Pekerja Korea (FKTU), pengusaha, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk menyusun agenda reformasi kesejahteraan sosial di Korea Selatan, Kemudian tahun 1998 aliansi masyarakat pro kesejahteraan yang terdiri dari lebih dari 20 organisasi sipil dan serikat pekerja mengajukan petisi untuk reformasi kesejahteraan total. Kolaborasi disistem demokrasi ini mengakibatkan pemerintah Korea Selatan memperluas cakupan dan cakupan program bantuan publik yang ada. Bahkan ketika pemerintah Moon Jae-In yang progresif berkuasa tahun 2017 serikat pekerja mendapat posisi tawar yang menguntungkan dalam

- Darini, Ririn. (2010). Park Chung Hee Dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. *Mozaik*. Volume V Nomor 1.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4336>
- Deutsche Welle (DW). (2020). Freedom House: Demokrasi dan Kebebasan di Dunia Mengalami Kemunduran. *Detik.com*.
<https://news.detik.com/dw/d-4928384/freedom-house-demokrasi-dan-kebebasan-di-dunia-mengalami-kemunduran>
- Flamirion, Gemael & Muradi. (2016). Demokrasi Civil Society Di Indonesia Dan India : Sebuah Perbandingan. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 2, Oktober
<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11061>
- Golechha, Mahaveer. (2015). Healthcare agenda for the Indian government. *Indian J Med Res*. Volume 141(2): 151-153.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4418149>
- Gunawan, Belinda. (2019). Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Di Indonesia. Vol. 4 No. 02. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*.
<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1642>
- Hague, Rod & Harrop, Martin. (2004). *Comparative Government and Politics An Introduction 6th Edition*. New York : Palgrave Macmillan
- Hikmah, Nurul. (2013). Hubungan Antara Demokrasi Dengan Pembangunan Ekonomi. *Jispar*. Vol. 2 No. 2.
<https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/359>
- Ibnu, S. Mukhadis, A & Dasna, IW. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Lemit UM
- Irfan, Reza M F. (2017). Kisah Taksi Kuning dan Pembantaian Mahasiswa Gwangju 1980. *Tirto.id*.
<https://tirto.id/kisah-taksi-kuning-dan-pembantaian-mahasiswa-gwangju-1980-cxNZ>
- Iriansyah, Herianto S. (2020). Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan). *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*.
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/277>
- Jagranjosh. (2022). Democracy Index 2021: Check the top and bottom

- Demokrasi Tahun 1980. Factum. Volume 7, NO.2. <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/15608>
- Purwanto, Agus B & Syawie M. (2012). Demokrasi dan Kesejahteraan (*Democracy and Welfare*). Informasi, Vol. 17, No. 01. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/64>
- Rachman, Ani. (2022). Korea Selatan: Keadaan Alam, Perekonomian, dan Bentuk Pemerintahannya. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/23/090000169/korea-selatan--keadaan-alam-Pemerintahannya>
- Rizaty, Monavia A (2022). 10 Negara dengan Indeks Demokrasi Tertinggi (2021). [databoks.katadata.co.id.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah)
- Sebayang, Rehia. (2019). Terbesar di Dunia, Seperti Ini Suasana Pemilu India. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190411174623-4-66143/terbesar-di-dunia-seperti-ini-suasana-pemilu-india>
- Suharto, Edi. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara : Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia ?. <http://policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>
- Syahnaz, Aniken Yustisia. (2021). Korelasi antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna. Jurnal Spektrum Hukum Vol 18, No 1. <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1624>
- Wang, Hye Suk. (2017). *Familial Foundations of the Welfare State Building the National Health Insurance Systems in South Korea and Taiwan*. Switzerland : Palgrave Macmillan
- Widuri, Dina Ratih. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2018. JIAP Vol 7, No 2, pp 306-318. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1123>
- Wie, Thee Kian. (2009). Pencapaian dan Tantangan Ekonomi India. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. <http://lipi.go.id/berita/pencapaian>

-dan-tantangan-ekonomi-
india/3308